PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Dakwah

Disusun Oleh :

S O I P
NIM : 99232678

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. Suisyanto
Dosen Fak. Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Sdr. S o i p
Lamp : 4 eksamplar

Kepada Yth,
Dekan Fak. Dakwah
IAIN Sunan KalijagaYogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamulaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : S o i p
NIM : 99232678
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui untuk diajukan ke sidang munaqosah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 November 2003
Pembimbing

Drs. Suisyanto
NIP . 150 228 025

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

(Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Yang disusun oleh:

S O I P
NIM. 99232678

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 4 Desember 2003 M/ 9 Syawal 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu dakwah.

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Moh. Abu Suhud, M. Pd
NIP. 150 241 646

Sekretaris Sidang

Drs. Moh. Abu Suhud, M. Pd
NIP. 150 241 646

Pembimbing/Penguji I

Drs. Suisyanto
NIP. 150 228 025

Penguji II

Drs. Aziz Muslim, M. Pd
NIP. 150 267 221

Penguji III

Suyanto, S.Sos, M. Si
NIP. 150 233 520

Yogyakarta, 4 Desember 2003 M
9 Syawal 1424 H

Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Sukriyanto, M. Hum
NIP. 150 088 689

MOTTO

فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غلظ القلب لانفضوا من

حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الامر فاداعزمت

فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjaukan diri dari sekeliling kamu. Karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kamu dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (**Ali-Imron: 159**)*

---

* Diutip dari *al-Qur'an dan Terjemahanya*, Departemen Agama RI, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001) hlm 115

PERSEMBAHAN

Untuk sepasang hamba Allah
Dengan kasihnya telah membesarkan dan mendidik saya

أم و أب

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Setelah melewati serangkaian, kesulitan yang mengaharuskan penulis untuk terus tegar, akhirhirnya sampai juga penulis diujung perbatasan. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, rasa syukur yang tidak terhingga penulis haturkan kepada Tuhan yang maha memberi petunjuk atas selesainya skripsi penulis yang berjudul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN** (Studi Kasus Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Selawat berbingkaikan salam kepada junjungan nabi besar Muhahammad SAW, seorang figur yang patut kita tauladani. Dan kepada para pengembang masyarakat, semoga dapat melanjutkan perjuangan beliau untuk menyebarkan ajaran Islam, membentuk generasi Islami, bermanfaat untuk agama, bangsa serta sesamanya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs, Sukriyanto. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Suisyanto, sebagai ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, juga selaku pembimbing, atas coretan, masukan dan koreksinya.
3. Drs. Abu Suhud, sebagai sekretaris jurusan Pengembanmgan Masyarakat Islam, atas sumbangan ide-nya.
4. Dosen Pengembangan Masyarakat Islam, bapak Drs.Aziz muslim, M. Pd Drs. Afif Rifa'i, M.Si. Drs.Moh. Nazili, Drs.Suyanto, Sriharini, S. Ag, M. Si, serta kepada dosen PMI yang lain, atas bimbingannya selama kuliah.

5. Bapak, Ibu, nenek, adik (Ita & Jaki) serta kakak di kampung, keberadaanya menyadarkan penulis untuk setia ke-tanah kelahiran.
6. Kemudian bocah-bocah "Amudas" Gus Hely dan Nyong, atas komputernya, Bahri, Mamex, Ardi, Bendot, Novi, Sohib (ternyata ada kekerasan yang tidak menyakitkan) dan juga anak-anak PMI '99, Amin, Dani, Ali, Ahmad, Surti, Eni, Ika, Lely, Rohim, Ian Hafidh, Didik, Lilik, Nurul, Johan, serta yang lain, atas kebaikannya selama ini.

Perhatian dan kebaikan mereka penulis serahkan kepada Allah SWT agar *Rahman Rahim*-Nya tak pernah terputus sampai-

Akhirnya penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Tentu saja skripsi ini mengandung banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Atas segala kekhilafan penulis sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,*wallohu a'lam bisshawab.*

Yogyakarta, 19 Nopember 2003

Penyusun

S O I P
NIM: 99232678

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
HALAMAN MOTTO.....iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR.....vi
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR TABEL.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul.....1
B. Latar Belakang Masalah.....3
C. Rumusan Masalah.....10
D. Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian,.....11
E. Kerangka Teoritik. 11
F. Metode Penelitian.....24

BAB II GAMBARAN UMUM DESA WONOKERTO

A. Keadaan Geografis.....28
B. Keadaan Penduduk.... 33
C. Keadaan Sosial Keagamaan.....35
D. Keadaan Pemerintahan.... 44

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
1. Tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat desa.....47
2. Tingkat usulan / ide yang diajukan masyarakat dalam rapat desa.....51

3. Pemberian solusi sumber-sumber dana untuk pembangunan.....52
4. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.....54
5. Pemilihan prioritas daerah yang akan dibangun.....56

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Tenaga pembangunan yang berupa gotong royong dari masyarakat.....57
2. Sumber-sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan.....60
3. Alat-alat yang digunakan dalam pembangunan desa.....62
4. Bahan-bahan material yang digunakan dalam pembangunan Desa.....63

C. Partisipasi dalam Pemanfaatan Pembangnan Desa
1. Manjaga hasil pembangunan.....65
2. Memanfaatkan hasil pembangunan.....66

D. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa
1. Pembandingan antara rencana dengan hasil pembangunan desa.....67
2. Ada tidaknya penyimpangan dalam proses pembangunan.....69

Bab IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan.. 73
B. Saran-Saran
1. Unutk aparat pemerintahan desa.....75
2. Untuk warga desa 76

C. Penutup.....77
D. Lampiran-lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keadaan Tanah Kelurahan Wonokerto.....30

Tabel 2: Tofografi atau Bentang Lahan 31

Tabel 3: Kesuburan Tanah.....31

Tabel 4: Kondisi Geografis.....32

Tabel 5: Penduduk Menurut Kelompok Umur.....33

Tabel 6: Perubahan Penduduk.....34

Tabel 7: Sarana fisik.....36

Tabel 8: Sarana Kesehatan.....37

Tabel 9: Mata Pencaharian Penduduk.....38

Tabel 10: Agama Penduduk.....39

Tabel 11: Sarana Pribadatan.....40

Tabel 12: Sarana Transfortasi.....40

Tabel 13: Sarana Komunikasi.....41

Tabel 14: Tingkat Pendidikan Penduduk.....43

Tabel 15: Sarana Pendidikan.....44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan persepsi yang salah dalam memahami penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, dengan harapan supaya pembaca mudah memahaminya.

1. Partisipasi Masyarakat

Britta Nikhelsen menterjemahkan partisipasi dengan beberapa tafsiran diantaranya yaitu:

a. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

b. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

c. Partisipasi adalah keterlibatan suka relah oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.[1]

Pengertian partisipasi masyarakat, dalam penelitian ini adalah keterlibatan aktif warga masyarakat desa dalam sebuah proses pembanguanan yang dilakukan di desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tahapan partisipasi masyarakat dalam

---

[1] Brittha Mikkelsen, *Metode penelitian, partipatoris dan Upaya-upaya pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 64.

pembangunan yang menjadi bahan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi..

2. Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah pengejawantahan program serta memobilisasi lingkungan baik yang dilakuakan oleh pemerintah, lembaga pengabdi masyrakat, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga menjadi kondusif untuk mewujudkan masyarakat yang lepas dari berbagai eksploitasi.

Pembangunan yang dimaksud dalam judul ini adalah rangkaian dari beberapa proses kegiatan yang dilakuakan di desa Wonokerto dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut, baik yang bersifat materil maupun mental spirituil. Adapun proses yang dimaksud adalah perencanaan program, pelaksanaan program, pemanfaatan program dan yang terakhir adalah evaluasi program.

3. Desa Wonokerto

Desa Wonokerto adalah Desa dimana peneliti melakukan peneltian, desa ini terletak di kecamatan Turi Kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta

Berdasarkan penjelasan diatas, dapatlah penulis katakan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Wonokerto kecamatan Turi kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta), adalah keikutsertaan warga (masyarakat desa Wonokerto) dalam

proses pembangunan, baik itu program pembangunan yang berbentuk materil maupun program pembangunan yang bersipat mental sprituil masyarakat itu scndiri. Peran masyarakat dalam proses pembangunan tersebut akan dilihat dari beberapa proses yaitu mulai dari tahap perencanaan pembangunan, kemudian tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pemanfaatan dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dari program pembangunan.

B. Latar Belakang Masalah

Meskipun pembangunan desa selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, berdasarkan fenomena bahwa sekitar 70 % masyarakat Indonesia hidup di sektor agraris sangat tergantung secara langsung pada alam, dengan sistem komunalitas yang sangat kuat, dengan demikian secara umum negara kita masih di dominasi oleh daerah pedesaan, banyak yang menganggap bahwa Indonesia yang sebenarnya adalah desa. Meskipun beberapa daerah ciri pedesaan itu susut berlahan bersamaan dengan proses industrialisai dan urbanisasi, akan tetapi ciri pedesaan tersebut tidak berarti hilang sama sekali, bahkan masi akan bertahan sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi arah dan sifat perkembangna kota.[2]

Strategi pembangunan pedesaan yang dominan hingga akhir tahun 1970 adalah masyarakat masih menjadi sasaran mobilisasi guna mencapai tujuan pembangunan tanpa terbukanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan

---

[2] Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat,* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 29

penilaian. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada mobilisasi pada dasarnya berangkat dari model pembangunan top-down.3 Pendekatan seperti dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, pada permulaan pemerintahaan orde baru, yaitu dengan melakukan mobilisasi masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana, pertanian dan lain sebagainya.

Pendekatan pembangunan dengan model *top- down* hanya akan menimbulkan ketergantungan masyarakat desa terhadap pemerintah.[4] Rakyat desa dalam kontek pendekatan srategi pedesaan tersebut perananya sangat pasif. Mereka menerima hasil pembangunan yang telah disiapkan segalah sesuatunya dari pemerintah dan organisasi nonpemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan daerahnya. Sifat ketergantungan kepada pemerintah akan berakibat lebih jauh dengan mematikan inisiatif masyarakat pedesan dalam menciptakan pembangunan, dan menghilangkan komitmen mereka untuk melestaarikan hasil-hasil pembangunan yang ada dalam masyarakatnya[5]. Ini hanya akan menyebabkan pembangunan pedesaan menjadi sangat mahal karena hilangnya semangat masyarakat pedesaan untuk mengembangkan diri mereka secara mandiri.

---

[3] Safri Sabirin, *Perubahan sosial Masyarakat Indonesia*,(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 256

[4] Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 39

[5] Loekman Sutrisno, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Kanisius: 2001), hlm. 149

Dalam situasi semacam ini muncul kritik terhadap pambangunan pedesaan, dengan mencari pormulasi baru mengenai strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembangunan pedesaan, Sebagai gantinya dimunculkan konsep baru dalam pembangunan pedesaan yakni *partisipasi* sebagai dasar baru dalam pembangunan pedesaan.

Gunawan mengatakan arti penting prinsip partisipati:

> "Dalam pembanguna yang semangkin berkembang masyarakat mamainkan peran sentral sebagai objek sekaligus sebagi subjek pembangunan, yang menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembangunan. Semua elemen bergerak seiring sejalan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahterah berdasarkan keadilan. Pembanguna yang demikian adalah pembangaunan dari masyarakat,dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk dinikmati masyrakat, dalam arti bahwa kemakmuran dihasilkan dari partisipasi aktif dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan.[6]"

Dalam hal ini posisi pemerintah hanya sebagai pasilitator sedang inisiatif pembangunan berasal dari masyarakat desa. Dalam strategi ini masyarakat pedesaan dilibatkan secara aktif dari seluruh proses pembangunan, sehingga kelestarian proyek-proyek pembangunan akan lebih terjamin.

Pembangunan partisipatif juga diungkapkan oleh Slemet Riyadi:

> Pemabangunan adalah suatu proses dinamika yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatakan peran serta mayarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup serta meningkatkan harkat dan martabat manusia.[7]

---

[6] Gunawan Sumodiningrat, *Sisitem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif* ,(Jakarta: Impac Wahana Cipta,1999), hlm. 78

[7] Slemet Riyadi: Pembangunan: Dasar-dasar dan Pengertianya, (Surabaya: Usaha Nasioanal, 1981),hlm 17

Implementasi kebijakan sebagai payung dalam pemperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sekarang dapat kita lihat dengan diberlakukanya Otonomi Daerah. Dengan otonomi ini, pembangunan diharapkan akan semakin terarah, dimana pemerintah pusat tidak lagi mengurus berbagai persoalan yang berada di daerah, sementara pemerintah daerah pun semakin dapat memfokuskan pembangunan untuk daerah dan dana lokalitasnya masing-masing.

Ikut andilnya masyarakat dalam pembangunan akan dapat menimbulkan rasa kepemilikan sekaligus sikap untuk memelihara hasil dari pembangunan. Selain itu keikutsertaan masyarakat salam pembangunan juga merupakan pengakuan bahwah dalam pembangunan manusia tidak hanya dilihat sebagai makhluk yang bersifat *value tranmitting* dan *value receivang* saja namun diakui sebagai makhluk yang bersifat *value creating* serta kunci utama berhasilnya sebuah pembangunan. Karena pada hakekatnya, usaha pembangunan itu dilaksanakan bersama oleh pemerintah dimana paradigma kebijakan pembangunannya harus berbasis pada dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah[8].

Untuk upaya ini, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan di tingkat yang paling rendah, seperti melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Karena kedudukan desa dan

---

[8] Dadang Julianto, *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta: Lapera Utama, 2002), hlm. 11

masyarakatnya merupakan dasar dan landasan kehidupan bangsa dan negara

Dalam upaya membangun desa ini, maka perlu diperhatikan berbagai komponen yang terkait dengan desa, baik komponen-komponen sosial, ekonomi dan politik dan agama masyarakatnya, maupun komponen yang mendukung, seperi letak geografis suatu desa. Hal ini sangat perlu, mengingat komponen-komponen tersebut sangat terkait, tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Selain itu, yang lebih penting lagi dalam pembangunan desa adalah bagaimana melihat masyarakatnya. Karena masyarakat desa merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan yang harus dibangun secara utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan hidupnya. Pembangunan ini dilaksanakan untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur masyarakat pedesaan. Sehingga pembangunan desa harus lebih dititik beratkan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut segi pembangunan fisik desa, segi sosial dan segi psikologis.

Untuk itu, pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik perlu diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan desa yang nyata dan bertanggungjawab dalam mengolah potensi desa secara nyata, optimal dan terpadu.

Dalam pembangunan desa ini, yang juga perlu diperhatikan adalah, bahwa pembangunan desa memerlukan biaya yang besar, tenaga yang besar dan waktu yang lama serta partisipasi masyarakat. Untuk yang terakhir ini, sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah pembangunan, karena keterlibatan masyarakat desa setempat secara langsung dan juga aparat desa setempat akan terlihat. Di sinilah akan muncul ide-ide pembangunan yang merupakan pendorong berhasilnya suatu pembangunan.

Berdasarkan uraian panjang diatas dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, partisipasi tidak hanya sekedar diartikan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan, dan partisipasi tidaklah hanya pada tahap pelaksanaan pembangunan saja. Partisipasi masyarakat meliputi keseluruhan spektrumnya, dari tahap menggagas sebagai kutub awalnya, kemudian tahap-tahap formulasi rencana, memonitor pelaksanaan mengevaluasi hasilnya, sampai pada tahap memberikan umpan balik sebagai kutub akhirnya.

Terlepas dari kaitan idealnya, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan sinergis sebagai model pembangunan. Dimensi teknis dari partisipasi masyarakat merupakan sesuatu perbuatan aktif yang menumbuhkan energi dan nilai tambah sosial ekonomi ataupun sosial kultural., Sedangkan dimensi politiknya adalah pengisian nyata dari paham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Semua anggota masyarakat aktif melakukan hak dan kewajiban sebagai partisipan, seluruh warga sangat

berperan produktif. Dengan demikian keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh bagaimana peran masyarakat desa dalam pembangunan itu sendiri.

Pembangunan di desa Wonokerto menjelang tahun 90-an menunjukan tingkat kemajuan bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, berbagi peningkatan baik dari sarana pisik maupun non pisik kian hari semangkin bertambah. Menurut informasi dari bapak Suhartono[9] penigkatan pembangunan tersebut berjalan lancar seiring dengan komitmen dari para aparatur desa Wonokerto untuk bersaing dengan daerah lain dalam meningkatkan pembangunan di desa Wonokerto.

Tingkat keikutsertaan warga dalam pembangunan menjelang tahun 90-an terbilang rendah, hal tersebut dapat dilihat dengan ketidakaktifan warga dalam setiap pertemuan pembangunan. Tinkat partisipasi masyarkat desa Wonokerto mulai terlihat di akhir tahun 90-an. Bantuan mereka terhadap biaya pembangunan merupakan andil dalam pembangunan. Kendati warga berperan dalam proses pembangunan, partisipasi yang dilakukan oleh warga sepertinya belum memenuhi seluruh dimensi partisipasi secara ideal.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keterlibatan msyarakat dalam proses pembangunan yang terjadi di desa yang meliputi perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan, khususnya di Desa Wonokerto yang

---

[9] Bapak Suhartono adalah salah satu warga desa Wonokerto dan juga aparatur desa, beliau telah mengapdi di kelurahan selama hampir 30 tahun, dan mulai tahun 92 pabak Suhartono dipercaya oleh warga desa Wonokerto untuk menduduki kursi jabatan sebagai kepala desa Wonokerto

merupakan lokasi dalam penelitian ini, dengan melihat apakah dalam setiap proses pembangunan desa masyarakat mempunyai andil untuk ikut berpartisipasi?, atau barangkali selama ini mereka hanya menerima pembangunan yang sifatnya *instan*. Karena melihat Pembangunan didesa tersebut terlihat cukup maju, baik dari pembanguan fisik maupun pembangunan sosial keagamaan, dalam setiap program pembangunan, masyarakat desa Wonokerto diharapkan benar-benar menyadari untuk menciptakan rencana mereka sendiri dengan jalan memanfaatakan berbagai macam sumber, karena didasarai bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan menolak bantuan ataupun saran[10]. Hal ini yang kemudian menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Wonokerto kecamatan Turi Kabupaten Sleman Jogjakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dipaparkan atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana partisipasi masyarakat desa Wonokerto Kecamtan Turi Kabupaten sleman Yogyakarta dalam pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta dalam evaluasi pembangunan yang dilakukan?

---

[10] M. Djauzi Moezakik, *Teori dan Praktek pengembangan masyarakat (Suatu pedoman Bagi praktisi)*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 13

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masayarakat desa Wonokerto dalam proses pembangunan, dengan melihat partisipasi mereka melalui empat tahap yaitu tahap dalam perencanaan program, pelaksanaan program, pemanfaatan dan yang terakhir adalah tahap evaluasiprogram pembvangunan.

2. Kegunaan Penelitian :

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai wacana dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dalam diskursus pembangunan, kususnya tentang partisipasi masyarakat. Kemudian penelitian ini juga kiranya akan bermanfaat buat desa dimana peneliti melakukan penelitian, sebagai masukan untuk proses pembangunan selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Prinsip masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut dimaksudkan baik dalam memikul beban dan tanggungjawab pelaksanaan pembangunan maupun di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Perlu diketahui bahwa berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh peran serta partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara

yang dalam hal ini adalah masyarakat, dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau keikutsertaan dalam program pemerintah..

a. **Definisi Tentang Pembangunan**

Bintoro Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai berikut :"Pembangunan adalah perubahan suatu proses pembaharuan yang terus menerus dari keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik[11]

Konsep pembangunan pada masa sekarang ini merupakan konsep yang paling mendesak, yang menawarkan nilai-nilai, Ideologi-ideologi dan pilihan-pilihan tujuan yang akan dicapai oleh pembangunan itu sendiri.

Pembangunan dipandang sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan keterbelekangan, kemelaratan dan kehancuran baik sebagai akibat keadaan yang dialami maupun sebab lain.

Pandangan mengenai pembangunan pada hakekatnya mencakup perubahan dan kemajuan lahiriah dan batiniah yang meiputi seluruh kehidupan sebagai cermin dalam perbaikan hidup dan keadilan sosial. Dalam artian pembangunan manusia seutuhnya terkandung pengertian bahwa pembangunan merupakan konsep normatif yang tidak saja mencapai kemajuan lahiriah belaka akan tetapi yang lebih luas.

Dengan demikian pengertian pembangunan jika dilihat secara

---

[11] Bintarto Tjokroamodjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1985), hlm. 22

dinamis merupakan upaya untuk merealisasikan potensi-potensi tersebut, sehingga dalan proses perubahan sosial tidak hanya terjadi pada pencapaian taraf hidup masyarakat belaka, melainkan juga mencakup dinamisasi dari seluruh pemerintahan dan unsur-unsur yang terlibat didalamnya sebagai "agent of change" dan masyarakat.

Ibnu Syamsi mengemukakan pembangunan, bahwa:

> "Pembangunan adalah usaha atau serangkaian proses usaha untuk pertumbuhan dan perkembangan yang dilaksanakan secara sadar dalam suatu negara menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa[12]".

Sedangkan Sondang P Siagian berpendapat :

> "Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa[13]".

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan secara terus menerus yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dari keadaan tertentu (belum baik) untuk menuju suatu keadaan yang dianggap lebih baik.

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian pembangunan banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Hal yang demikian merupakan penyebab terdapatnya beberapa sudut pandang dalam memberikan pengertian pembangunan. Dari berbagai sudut pandang

---

[12] Ibnu Syamsi, *Dsar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara,* (Jakarta: Bina Aksara, 1990), hlm. 6

[13] Sondang P Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 3

tersebut pembangunan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pembangunan yang bersifat fisik material dan pembangunan yang bersifat spiritual. Pembangunan yang bersifat fisik material adalah pembangunan yang secara langsung nampak, dapat dirasakan oleh panca indera atau dengan kata lain lebih bersifat nyata.

Menurut Talizidhuhu Ndraha pembangunan dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu :

a. Prasarana produksi, misalnya : Dam, Bendungan, saluran air, Listrik dan sebagainya.
b. Prasarana pemasaran, misalnya : kios, toko, pasar, gedung dan lain sebagainya.
c. Prasarana perhubungan misalnya: jembatan, jalan dan lainnya
d. Prasarana sosial misalnya : Sekolah, Puskesmas, Masjid, lapangan olah raga dan sebagainya[14].

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan program pembangunan adalah suatu program yang dilaksanakan untuk perubahan kearah kemajuan yang ada di desa, yang dicanangkan oleh pemerintah desa setempat dan juga oleh masyarakat desa tersebut. Pembangungan ini dapat berupa prasarana produksi, prasarana pemasaran, prasarana perhubungan, prasarana sosial dan pembangunan mental spritual.

---

[14] Talizidhuhu Ndraha *Metodologi penelitian Pembangunan Desa,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). hlm. 14

Menurut Todaro keberhasilan pembangunan ditinukan dengan 3 nilai pokok yaitu:

a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk Memenuhi kebutuhan pokok(Basic needs)
b. Meningkatnya rasa harga diri)Self-esteem) Masyarakat sebagai manusia
c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from serviude) yang merupakan sala satu dari hak manusia.[15]

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pengertian partisipasi adalah sebagai berikut :

> Keikutsertaan aktif atas partisipasi dapat berarti pula keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Keterlibatan memikul tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan[16].

Sedangkan Keith Davis memberikan pengertian partisipasi adalah sebagai berikut :

> Partisipasi sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi kelompok baik secara mental/pikiran maupun emosional/perasaan yang mendorongnya untuk menyumbangkan daya pikir dan perasaan bagi tercapainya tujuan kelompok dan ikut serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan kelompok[17]

Dari kedua pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan pembangunan dimana keterlibatannya tersebut dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari proses

---

[15] Todaro, dalam Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan,* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1999) hlm. 11

[16] Bintarto Tjokroamodjojo, *Perencanaan Pembangunan,* hlm. 207.

[17] Keit Devis, dalam Santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 25

penentuan kebijaksanaan memikul tanggungjawab secara moril maupun materiil dan dalam menikmati hasil dan manfaat pembangunan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan macam-macam partisipasi menurut Keith Davis, dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu : (a) partisipasi pikiran, (b) partisipasi tenaga, (c) partisipasi tenaga dan pikiran, (d) partisipasi keahlian, (e) partisipasi barang dan (f) partisipasi uang[18]

Sedangkan macam-macam partisipasi menurut Talizidhuhu Ndraha yang mengutip pendapat dari beberapa ahli adalah:

a. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
b. Partisipasi dalam memberi tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima.
c. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
e. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan.
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan[19].

Dari bermacam-macam partisipasi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya macam-macam partisipasi tersebut merupakan bentuk parisipasi dalam proses kegiatan pembangunan yang meliputi :

a. Keterlibatan seseorang dalam menerima manfaat/hasil-hasil pembangunan.
b. Keterlibatan masyarakat secara fisik atau tenaga dalam pelaksanaan program. Partisipasi bentuk ini dapat dilihat pada keterlibatan masyarakat secara fisik dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya

---

[18] *Ibid*, hlm. 16

[19] Talizidhuhu Ndraha, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, hlm. 26-27

dengan memberikan/menyumbangkan materi maupun tenaga.

c. Keterlibatan masyarakat dalam menerima manfaat/hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ini diharapkan dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan memutuskan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan apabila kegiatan tersebut dapat menghasilkan suatu manfaat/keuntungan bagi dirinya atau setidak-tidaknya masyarakat akan ikut berpartisipasi apabila tidak akan memperoleh kerugian.

Menurut Mubyarto, partisipasi masyarakat adalah : "Kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan pribadi."[20]

Makna yang dapat dikemukakan dari pengertian di atas menurut penyusun adalah partisipasi merupakan sikap kesadaran seseorang secara mental pikiran dan emosi atau perasaan untuk ikut terlibat dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah tanpa unsur paksaan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pada dasarnya partisipasi masyarakat menyangkut dua aspek, yaitu :

a. Partisipasi sebagai hak

Mengandung pengertian bahwa setiap masyarakat merupakan peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul

---

[20] Mubyarto, *Strategi Pembangunan Desa Terpadu*,(Yogyakarta: PPSK UGM, 1982), hlm.35

dalam proses pembangunan.

b. Partisipasi sebagai kewajiban

Mengandung pengertian bahwa setiap masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban tanggungjawab dan mensukseskan jalannya pembangunan[21].

Moeljarto mengatakan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat adalah :

a. Partisipasi adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan.
b. Partisipasi masyarakat menopang pembangunan.
c. Partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
d. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi dalam pembangunan individu[22].

Sedangkan kondisi yang mendukung partisipasi masyarakat adalah:

a. Strategi pembangunan diarahkan bagi masyarakat miskin.

b. Adanya struktur kepemimpinan yang cocok, karena para pemimpin desa mempunyai kepentingan yang sama dengan si miskin sendiri atau karena adanya persaingan yang signifikan untuk kedudukan kepemimpinan dari mereka yang mewakili kepentingan bukan kaum elit. Pembentukan kelompok-kelompok atau organisasi yang mendukung pembangunan pedesaan[23].

---

[21] *Ibid.*, hlm. 209

[22] Moeljarto, *Politik Pembangunan,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 48

[23] *Ibid.*, hlm. 49

Pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang sedang berjalan yang perlu diperhatikan adalah bervariasinya intensitas beberapa lapisan masyarakat yang ada misalnya saja tentang pendidikannya serta bervariasinya motivasi yang mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut. Menurut Moeljarto, motivasi yang mendasari partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu :

a. Berpartisipasi karena perasaan takut
b. Berpartisipasi karena sekedar ikut-ikutan solidaritas
c. Berpartisipasi karena dasar bahwa berpartisipasi tersebut merupakan hak dan sekaligus kewajibannya[24].

Menurut pandangan penyusun, bentuk partisipasi karena mengerti dan sadar bahwa berpartisipasi adalah merupakan hak dan sekaligus kewajibannya inilah yang paling ideal. Oleh karena bentuk partisipasi yang disadari dianggap paling ideal, maka yang penting untuk diperhatikan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat adalah menanamkan pengertian secara luas dan merata tentang makna program pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran Talizidhuhu Ndraha di atas, partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi di dalam pembangunan desa terakumulasikan ke dalam empat hal yaitu :

---

[24] *Ibid.*, hlm. 50

a. Partisipasi dalam penyusunan/perencanaan kegiatan

b. Partisipasi dalam implementasi/pelaksanaan kegiatan

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan hasil pembangunan

d. Partisipasi dalam evaluasi program pembqngunan

Pertama, partisipasi dalam penyusunan/perencanaan kegiatan. Maksudnya adalah seluruh anggota masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya dalam segala penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan kegiatan ini akan dibahas mengenai beberapa hal yang menyangkut pembangunan desa khususnya pembangunan seperti: bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan, kapan waktu pelaksanaannya, sumber-sumber dana yang akan digali.

Untuk membahas perencanaan pembangunan ini, diperlukan adanya komunikasi yang baik antar warga desa dengan aparat desa. Maka dalam proses perencanaan pembangunan ini dikenal adanya dua arah yaitu: Proses dari atas ke bawah, yakni dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa/aparat desa yang dituangkan dalam bentuk kebijakan operasional dalam bentuk sektor pembangunan yang akan dilaksanakan Proses dari bawah ke atas, dalam arti datangnya rencana dan keinginan pembangunan adalah dari bawah yaitu dari warga masyarakat yang tertuang dalam berbagai bentuk rencana pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan desa baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas sama-sama memerlukan partisipasi dari

seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat vital.

Kedua partisipasi dalam implementasi/pelaksanaan kegiatan. Dalam pembangunan desa keberhasilan pembangunan sangat tergantung dari pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa ini melibatkan semua unsur dan elemen yang ada dalam masyarakat seperti: unsur tenaga kerja dalam hal ini adanya gotong royong masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, adanya sumber-sumber dana yang akan diambil untuk membiayai pembangunan desa, alat-alat yang digunakan untuk pembangunan (misalnya: mesin giling, pengaduk semen, alat-alat pertukangan), bahan-bahan/material yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa (kayu, batako, semen, dll)

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kegiatan. Setelah tahap perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan, maka tahap selanjutnya yang sebaiknya seluruh masyarakat mampuh untuk memfungsikan serta menjaga hasil-hasil dari kegiatan pembangunan. Dalam tahap ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mampuh memfungsikan secara optimal hasil dari pembangunan itu sendiri

Keempat, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan. Setelah tahap perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan, maka tahap selanjutnya yang sebaiknya dilakukan oleh

seluruh masyarakat adalah mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan. Dalam evaluasi ini dilakukan pembandingan antara segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan dengan yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaannya. Sehingga diketahui adanya kekurangan ataupun kelebihan dari pelaksanaan pembangunan, ada penyimpangan pembangunan atau tidak dan apakah pembangunan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh warga masyarakat.

Keempat hal diatas yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan adalah syarat mutlak yang perlu dilakukan oleh aparat desa beserta seluruh warganya agar pembangunan di desanya berhasil dengan baik. Adanya perencanaan pembangunan yang matang, dan juga adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terpadu dari masyarakat serta adanya pemanfaatan pembangunan yang transparan, niscaya pembangunan desa dapat dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Secara operasional partisipasi dapat diidentifikasi dengan prilaku masyarakat yang meliputi:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa yaitu :
   a. Kehadiran masyarakat dalam rapat desa
   b. Usulan / ide yang diajukan masyarakat dalam rapat desa
   c. Pemberian solusi sumber-sumber dana untuk pembangunan
   d. Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu
   e. Wilayah/daerah mana saja yang akan akan dibangun

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu
   a. Tenaga pembangunan yang berupa gotong royong dari masyarakat
   b. Sumber-sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan
   c. Alat-alat pembangunan yang digunakan
   d. Bahan-bahan material yang digunakan dalam pembangunan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan pembangnan:
   a. Manjaga hasil dari pembangunan
   b. Memanfaatkan hasil dari pembangunan
4. Evaluasi pembangunan desa yaitu :
   a. Pembandingan antara yang seharusnya terjadi dan yang sebenarnya terjadi dalam pembangunan desa
   b. Ada tidaknya penyimpangan dalam proses pembangunan

F. Metode Penelitian

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat desa Wonokerto dalam pembangunan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi, kurun waktu 2002/2003. Kemudian untuk mendapatkan data tentang obyek penelitian, maka dibutuhkan subyek penelitian. Secara teoritis yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data

yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti[25]. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam proses pembangunan di desa Wonokerto, kecamatan Turi kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Aparatur Desa: yaitu orang-oarang yang duduk di kursi pemerintahan desa Wonokerto.
b. Tokoh Masyarakat: adalah para pemuka di desa Wonoketo baik itu tokoh agama maupun tokoh adat.
c. Kelompok Kepemudanyaitu organisasi kepemudaan yang terlibat dalam proses pembanugnan
d. Dan sebagian warga masyarakat adalah individu-individu yang aktif dalam pembangunan yang dilaksakan di desa Wonokerto.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari responden, atau dengan kata lain, wawancara adalah pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti hanya membuat pokok

---

[25] Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 1988), hlm. 135

masalah mengenai partisipasi masyarakat, selanjutnya proses wawancara menyesuaikan dengan keadaan dan orang yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Dengan metode ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada responden yang telah dipilih, untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu masyarakat di desa Wonokerto, kecamatan Turi kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti atau diselidiki.[26] Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data guna mengetahui gambaran umum mengenai desa Wonokerto, kecamatan Turi kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta, selain itu juga untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses pembangunan dan partisipasi masyarakatnya. Dengan cara observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan mencatat data-datanya secara sistematis

c. Metode Dokumentasi

Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti: arsip-arsip, keputusan hasil rapat, data program

---

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998,.hlm. .234

pembangunan, Monograpi desa dan lain-lain. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari interview dan observasi dari partisipasi masyarakat desa Wonokerto, kecamatan Turi kabupaten Sleman propinsi Yogyakarta dalam proses pembangunan.

3. Analisis Data

Dalam proses penganalisaan data yang akan penulis gunakan adalah cara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena partisipasi masyarakat desa Wonokerto dalam pembangunan yang relevan dengan tujuan penelitian. Masri Singarimbun megatakan bahwa tujuan analilsa adalah meyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dimengerti dan dipahami.[27] Sebagaimana data-data yang diberikan oleh informan yang belum berbentuk kalimat disusun menjadi kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti.[28] Sedangkan pengambilan kesimpulan penulis meggunakan metode deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Untuk proses penganalisaan data peneliti menggunakan beberapa langkah, *pertama*: persiapan, yaitu: menelaah hasil seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, survei, serta dokumen. Kemudian langkah *kedua* adalah:Tabulasi, yaitu memberikan kode pada data dan mengubah jenis data, disesuaikan atau

---

[27] Masri singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1998) hlm. 231

[28] *Ibid*,.hlm. 231

dimodifikasi dengan teknik analisa yang akan digunakan. Dan langkah *ketiga* dari proses anailasa data ini adalah penafsiran terhadap data.

Proses semacam inilah yang akan peneliti lakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan: bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta dalam evaluasi pembangunan yang dilakukan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta?

BAB II

TINJAUAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Letak

Kelurahan Wonokrto merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Turi Kabupaten sleman, jarak kekecamatan sekitar 4 km dengan waktu tempuh dari Kelurahan wonokrto menuju ke-Kecamatan Turi adalah 10 menit/ jam, jarak ke Ibu kota Kabupaten 11 km arah utara dari Ibu Kota Kecamatan Turi. Adapun jarak dari Ibukota Propinsi adalah 28 km. Sedangkan jarak Kelurahan wonokertp dengan Ibukota Negara adalah 600 km.

Dengan demikian jarak desa Wonokerto dengan wilayah pusat pemerintahan relatif dekat. Keadaan tersebut memudahkan warga masyarakat untuk berinteraksi demi kebutuhan pembangunan didesa Wonokerto. Kemudian masyarakat akan dapat lebih mudah untuk membandingkan pembangunan yang terjadi di desa mereka dengan desa yang lainya, keadaan tersebut didukung dengan saran transportasi yang lancar.

2. Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan wonokerto adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Hutan Lindung Lereng Merapi

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Donokerto, Kecamatan Turi

c. Sebelah Barat : Kelurahan Bangungkerto,Kecamatan Turi dan Kabupaten Magelang

d. Sebelah Timur : Kelurahan Girikerto, Kecamatan Turi

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kelurahan Wonokerto berdasarkan data yang penyusun peroleh dari kantor Kelurahan Wonokerto adalah 814,52 Km, yang terdiri dari 13 (tigabelas) dusun yaitu: Jambusari, Banjarsari, Gondoarum, Tunggularum, Sempuh, Imorejo, Mangungsari, Puleasri, Dukuhsari, Kembnag, Pojok, Ndadapan, Kenteng. Sebagian wilayah desa Wonokerto berupa tanah pekarangan/perumahan dan tanah pertanian. Mengenai penggunaan tanah Kelurahan Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Penggunaan Tanah Kelurahan Wonokerto

No	Penggunaan Tanah	Luas (km)	%
1	Perumahan/pekarangan	516,87	63,45
2	Jalan	2	0,24
3	Pertanian	100,26	12,30
4	Pekuburan	35	4,3
5	Tegalan	17,70	2,18
6	Lain-lain	142,69	17,52
	Jumlah	**814,52**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto 2003

Melihat dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar tanah di Kelurahan wonokerto dipergunakan sebagai pekarangan dan pemukiman penduduk, yaitu seluas 516,87 Km atau 63,45 % dari total luas wilayah Kelurahan Wonokerto. Disamping untuk pekarangan/pemukiman penduduk, tanah di Kelurahan Wonokerto juga dipergunakan sebagai tanah sawah yaitu seluar 100,26 Ha atau 12,30 %. Lainnya dipergunakan sebagai jalan, pekuburan, tegalan dan lain-lain.

4. Keadaan Tanah dan Iklim

a. Keadaan Tanah

Tabel 2
Topografi atau Bentang Lahan

No	Bentang Lahan	Luas (ha)
1	Dataran	-
2	Perbukutan/Pegunungan	1558
	Jumlah	1558

Tabel 3
Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (ha)
1	Sangat Subur	.....
2	Subur	744,4
3	Sedang	253,8
4	Tidak Subur	61

Tanah merupakan salah satu faktor produksi, selain dari faktor modals dan tenaga kerja.. Tanah di Kelurahan wonokerto merupakan

tanah dataran tinggi dan sebagian wilayahnya merupakan kaki dari gunung Merapi. Kemudian wonokerto memiliki tanah yang subur, yang sebagian besar digunakan untuk pekarangan/ pemukiman dan tanah sawah.

b. Iklim

Tabel 4
Kondisi Geografis

No	Kondisi Geografis	Keterangan
1	Tinggi tempat dari permukaan Laut	400-900 m
2	Curah Hujan Rata-Rata per-Tahun	3,908mm
3	Keadaan Suhu Rata-Rata	24-28 C

Keadaan iklim memang sangat mempengaruhi semua aktifitas manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Kehidupan perekonomian pun sangat dipengaruhi oleh iklim misalnya: perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Kelurahan Wonokerto seperti juga daerah lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu: musim penghujan, yang dimulai dari bulan oktober sampai bulan april, dan musim kemarau, yang dimulai dari bulan april sampai bulan oktober.

Dari keadaan tana serta iklim yang baik, warga terus mengoptimalkannya untuk peningkatan produktivitas pertanian yang mereka miliki. Dengan mengadakan beberapa sarana pendukung seperti saluran air, dan lain sebagainya. Dan untuk pengadaan saran tersebut biasanya mereka lakukan secara bersama-sama.

B. KEADAAN PENDUDUK

Jumlah penduduk di Kelurahan Wonokerto adalah 8273 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak: 4039, dan jumlah penduduk perempuan 4234 jiwa Untuk mengetahui jumlah penduduk Kelurahan Wonokerto menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok umur	Jumlah	%
1	0 - 12 Bulan	325	3,92
2	13 Bulan - 4 Tahun	341	4,12
3	5 - 6 tahun	309	3,73
4	7 - 12 tahun	907	10,96
5	13 - 15 tahun	611	7,38
6	16 - 18 tahun	525	6,34
7	19 - 25 tahun	1082	13,07
8	26 - 35 tahun	1307	15,79
9	36 - 45 tahun	1135	13,71
10	46 - 50 tahun	483	5,83
11	51 - 60 tahun	446	5,39
12	61 - 75 tahun	541	6,53
13	Lebih dari 76 tahun	263	3,17
	Jumlah	8273	100

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto tahun 2003.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Wonokerto relatif sedikit. Adapun jumlah

penduduk yang terbanyak adalah pada kelompok umur 25–35 bulan yaitu 1307 jiwa (15,79%) dan yang paling sedikit adalah penduduk pada kelompok umur 76 tahun keatas tahun yaitu 3,17 jiwa. Berdasarkan tabel, usia produktif dapat digolongkan mulaidari 19-50 tahun,dengan jumlah sekitar 4007 jiwa. Biasanya mereka yang usia prosuktif inilah yang dominan untuk mengikuti kegiatan program pembangunan, sekalipun ada beberapa dari kelompok umur yang lain juga mengikuti kegiatan pembngunan, tetapi tidak sebanding denagan mereka yang usia produktif.

1. Perubahan Penduduk

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun di dalam suatu wilayah akan selalu mengalami perubahan. Perubahan ini erat kaitannya dengan kejadian lahir, mati, datang dan pergi, begitupun yang terjadi di Kelurahan Wonokerto. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Perubahan Penduduk

No	Keterangan	Jumlah
1	Lahir	164
2	Mati	32
3	Datang	40
4	Pergi	45

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto tahun 2003

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan penduduk Kelurahan Wonokerto adalah sedang dan dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{(Lahir - Mati) + (Datang - Pergi)}{Jumlah\ penduduk} x100\%$$

$$= \frac{(164 - 32) + (40 - 45)}{8273} \times 100\%$$

$$= 0{,}326\ \%$$

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kelurahan Wonokerto secara menyeluruh adalah 8273 jiwa dengan luas 814,52 ha. Dari hal ini dapat kita tinjau kepadatan penduduk Kelurahan Wonokerto yaitu :

$$= \frac{Jumlah\ penduduk}{Luas\ Wilayah} x1km^2$$

$$= \frac{8273}{814{,}52} x\ 1km^2$$

$$= 10{,}156\ \text{jiwa/km}^2$$

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kepadatan penduduk di Kelurahan Wonokerto adalah jarang, dimana disetiap 1 km^2 hanya dihuni oleh 585 jiwa. Hal ini wajar karena Kelurahan Wonokerto wilayahnya cukup luas.

C. KEADAAN SOSIAL

Keadaan masyarakat desa Wonokerto bila dilihat dari kehidupan sosialnya dapat dikatakan termasuk dalam taraf yang berkecukupan. Hal

ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi, tingkat pendidikan maupun fasilitas atau tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang memadai yang terdapat di desa ini. Untuk fasilitas umum saja, sudah terdapat masjid, jalan, jembatan, pos keamanan, Puskesmas, musholla, gedung sekolah dan lain-lainnya, bahkan untuk masjid hampir di tiap-tiap dusun dapat dijumpai.

1. Sarana Fisik

Untuk mengetahui seberapa banyak sarana fisik yang terdapat di desa Wonokerto, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Sarana Fisik

No	Sarana	Jumlah	%
1	RS Bersalin/BKIA	2	3,1
2	Puskesmas pembantu	1	1,5
3	Masjid	17	26,2
4	Mushola	5	7,7
5	Gedung TK	5	7,7
6	Gedung SD	3	4,6
7	Gedung SMP	1	1,5
8	Bendungan (Dam)	2	3,1
9	MCK	7	10,8
10	Jalan Desa (utama)	1	1,5
11	Jalan Dusun	15	23,1
12	Jembatan	6	9,2
	Jumlah	65	100

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto tahun 2003.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa, sarana dan prasarana fisik di desa Wonokerto cukup memadai, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Hal ini menjadikan masyarakat desa Wonokerto dapat melakukan aktifitas dan pekerjaan mereka dengan lebih baik.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan unsur yang penting dalam kehidupan sehari-hari, maka masalah kesehatan harus diperhatikan dan diprioritaskan. Dengan kesehatan, setiap manusia dapat melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Adapun sarana atau prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Wonokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Sarana Kesehatan

No	Sarana	Jumlah	%
1	Rs Bersalin/BKIA	2	28,6
2	Puskesmas pembantu	1	14,3
3	Bidan	1	14,3
4	Praktek Dokter	2	28,6
5	Dukun Bayi	1	14,3
	Jumlah	7	100

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto tahun 2003.

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Wonokerto cukup memadai. Apabila ada masyarakat yang ingin berobat dapat pergi ke puskesmas pembantu

atau ke praktek dokter yang ada di Kelurahan Wonokerto. Semua sarana dan prasarana kesehatan ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh warga masyarakat.

3. Mata Pencaharian

Untuk dapat memperoleh penghasilan maka seseorang harus mempunyai mata pencaharian, sehingga penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun mata pencaharian penduduk Kelurahan Wnokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	PNS	332	4,013
2	TNI	69	0,616
3	Karyawan Swasta	321	3,88
4	Pedagang	274	0,87
5	Petani	2481	29,94
6	Jasa lembaga keuangan	18	0,13
7	Pegawai BUMN	12	0,09
8	Buruh Tani	335	4,04
9	Pensiunan	85	0,87
10	Jasa	58	0,368
	Pelajar/ Mahasiswa dll	4398	53,16
	Jumlah	**8273**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Kelurahan Wonokerto bermacam-macam. Yang terbanyak adalah sebagai petani yaitu 2481 orang atau 29,94%. Pertanian di desa Wonokerto lebih banyak didominasi oleh salak, Sedangkan yang paling sedikit adalah sebagai pegawai BUMN yaitu 12 orang atau 0,95%. Dengan dimilikinya mata pencaharian maka masyarakat akan mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dari data tersebut dapat dikemukakan bahwa penghasilan penduduk desa Wonokerto relatif homogen, hal tersebut sangat membantu untuk melakukan konsolosidasi pada masyarakat, serta penentuan jadwal jika ada gotong royong dalam pembangunan.

4. Agama

Penduduk di kelurahan Wonokerto rata-rata beragama Islam. Namun begitu ada juga yang beragama Kristen dan Katolik. Adapun jenis agama yang dianut penduduk Kelurahan Wonokerto dan jumlah pemeluknya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

Agama Penduduk

No	Agama	Jumlah	%
1	Islam	7690	92,95
2	Kristen	60	0,07
3	Katholik	518	6,26
	Jumlah	**8273**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Wonokerto beragama Islam yaitu sebanyak 7690 orang (92,95%). Penduduk yang beragama Kristen ada 60 orang (0,07%), sedangkan yang beragama Katholik ada 518 orang (6,26%).

Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam namun kerukunan warga tetap terjaga. Hal ini karena adanya kesadaran beragama yang dimiliki oleh warga Kelurahan Wonokerto, sehinga tidak ada kesulitan antara satu warga dengan warga yang lainya untuk berkumpul serta melakukan kegiatan secara bersamaan. Adapun sebagai sarana peribadatan bagi penduduk Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11
Sarana Peribadatan

No	Sarana	Jumlah	%
1	Masjid	17	68
2	Mushola	5	20
3	Gereja	3	12
	Jumlah	**25**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

5. Transportasi

Untuk bepergian ke lain tempat agar cepat sampai, maka diperlukan sarana transportasi yang memadai. Di Wonokerto, keadaan transportasi sudah cukup bagus ehingga mobilitas masyarakatnya dapat

berjalan dengan lancar. Adapun alat-alat transportasi yang ada atau dimiliki penduduk di Kelurahan Wonokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 12

Sarana Transportasi

No	Sarana	Jumlah	%
1	Sepeda Motor	417	60,09
2	Gerobak	2	0,28
3	Sepeda	217	31,27
4	Mobil pribadi	42	6,05
5	Truk	7	1,01
	Jumlah	**685**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana transportasi yang ada di Kelurahan Wonokerto cukup memadai. Sarana transportasi yang paling banyak adalah sepeda motor yaitu 417 buah atau 60,09%. Pemilik sepeda juga cukup banyak yaitu 217 orang atau 31,27%. Dengan adanya sarana transportasi tersebut akan memudahkan masyarakat kelurahan Wonokerto untuk pergi ke luar daerah dengan cepat serta menghemat waktu. Di tambah dengan masuknya kendaraan umum yang sekarang melewati lalur desa Wonokerto.

6. Komunikasi

Untuk dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya orang selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam lingkungan daerah sendiri maupun dengan orang di luar daerah sekitarnya. Untuk itu

dibutuhkan sarana komunikasi yang baik untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Sarana komunikasi yang ada di Kelurahan Wonokerto juga beragam, seperti berikut

Tabel 13

Sarana Komunikasi

No	Sarana komunikasi	Jumlah	%
1	ORARI	3	0,51
2	Telepon	61	10,41
3	Televisi	236	40,27
4	Radio	280	47,78
5	Antena Parabola	6	1,02
	Jumlah	**586**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada berbagai macam sarana komunikasi di Kelurahan Wonokerto. Hal ini sangat membantu di dalam berkomunikasi dengan orang lain di luar daerah maupun di dalam daerah. Sarana komunikasi yang paling banyak dimiliki oleh warga adalah radio yaitu 280 buah (47,78%). Selain itu banyak pula warga yang telah memiliki pesawat telepon pribadi dan juga banyak warga yang memiliki antena parabola. Bahkan saat ini banyak juga penduduk yang menggunakan Handphone. Ini menunjukkan bahwa penduduk Wonokerto juga tanggap terhadap kemajuan teknologi yang semakin maju. Dengan banyaknya sarana komunikasi yang telah similiki oleh warga proses interaksi dengan warga luar daerah Wonokerto menjadi sangat lancar.

7. Pendidikan

Pendidikan adalah bidang yang paling utama karena masyarakat yang berpendidikan bisa menunjang pembangunan di segala bidang. Dengan pendidikan akan terwujud manusia seutuhnya yang mampu melaksanakan pembangunan.

Adapun tingkat pendidikan penduduk di Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14

Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak pernah sekolah	886	18,58
2	TK	183	3,84
3	Tidak tamat SD	839	17,59
4	Tamat SD	876	18,36
5	Tamat SMP/Sederajat	654	13,71
6	Tamat SMA/Sederajat	548	11,49
7	Tamat D3	17	0,36
8	Tamat S1	13	0,27
	Jumlah	**4.769**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar warga Kelurahan Wonokerto sudah mengenyam pendidikan, namun ada juga yang belum pernah mengenyam pendidikan, mereka ini khususnya dari golongan tua ataupun petani. Sekalipun warga yang berpendidikan

tidak sebanyak dengan yang tidak berpendidikan, hal tersebut tidak berpengaru terhadap semangat gotong royong, serta kebersamaan antar warga. Tradisi kebersamaan masih melekat dalam diri mereka, keadaan seperti menunjukan bahwa kultur kaum pedesaan masih terjaga.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan memadai. Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Wonokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15

Sarana Pendidikan

No	Sarana pendidikan	Jumlah	%
1	Gedung TK	5	55,5
2	Gedung SD	3	33,4
3	Gedung SMP	1	11,1
	Jumlah	**9**	**100**

Sumber : Monografi Kelurahan Wonokerto Tahun 2003.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 buah sarana pendidikan yang berupa Gedung TK, gedung SD dan gedung SMP yang ada di Kelurahan Wonokerto. Dengan demikian dapat dikatakan sarana pendidikan tersebut cukup memadai untuk ukuran sebuah Kelurahan. Apabila ada yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, warga dapat meneruskan pendidikannya ke kota yang jaraknya tidak begitu jauh.

D. PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pemerintahan Kelurahan ini terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan.

1. Kepala Kelurahan

Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan Kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat. Kepala Kelurahan dilarang melalaikan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Kelurahan. Peran aparatur desa tentunya akan terus diperlukan, sebagai lembaga birikrasi desa kelurahan memiliki tanggung jawab moral dalam menstimulasi warga untuk selalu melaksanakan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh warga baik itu pembangunan atau yang lainya.

2. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan. Sekretariat Kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Urusan. Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Urusan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Apabila Kepala Kelurahan berhalangan maka Sekretaris Kelurahan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan sehari-hari.

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepali oleh Kepala Lingkungan. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Partisipasi masyarakat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemnafaatan serta evaluasi pembangunan yang telah dilakukan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, Hasil penelitian ini merupakan gambaran tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selanjutnya untuk pembahasan lebih rinci, akan penulis uraikan sebagai berikut:

A. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa

1. Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Rapat Desa

Di kelurahan Wonokerto tampak sekali bahwa masyarakat cukup antusias unutk hadir dalam rapat dalam membangun desa. Ini tentu saja tidak luput dari peran perangkat desa yang senantiasa memberikan suport dan mengajak bersama-sama untuk bergotong-royong dalam memajukan desa Wonokerto. Untuk meningkatkan pembangunan di Desa Wonokerto, Desa memiliki acuan yang tertuang dalam progam kebijakan desa, kebijakan tersebut adalah *Musbangdes* (Musyawara Pembanguan Desa), adalah sebuah pertemuan yang khusus membicarakan tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Wonokerto, musyawara

pembangunan hanya dilakukan oleh desa sebanyak dua kali selama satu tahun, yaitu pada bulan maret dan pada bulan agustus, namun untuk waktu musyawara tersebut dapat berubah, dengan kelurahan sebagai tcmpat pertemuan.

Sebgaimana yang ungkapkan oleh bapakWidodo:

> Rapat desa dilakukan melalui musbagdes (musyawara pembangunan desa yang dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, dihadiri oleh wakil dari kelompok kegiatan baik itu dari RT, kelompok kepemudaan atau yang lainya, dan karena kegiatan tersebut melibatkan masyarakat banyak maka kegiatan tersebut dilakukan di balai desa Wonokerto[29]

Musayawara pembangunan desa dilakukan sebagaimana halnya prosesi musyawara biasa, dan setiap yang hadir wajib untuk mengisi presensi yang sudah disediakan tersedia. Ketentuan di desa Wonokerto Musbangdes adalah membicarakan pembangunan pada tahun berikutnya, misalnya program pembangunan tahun 2004, maka progaram tersebut di musywarakan pada tahun 2003, menurut bapak Bambang musayawara program tersebut sudah selesai perancanganya maksimal pada bulan Desember awal.[30]

Sebagai perwujudan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, adalah ikut aktifnya masyarakat dalam pertemuan ataupun rapat-rapat, yang diadakan untuk membahas pembangunan desa. Sala satu perangkat desa, yang ditemui peneliti mengakui, tingginya partisipasi masyarakat desa ini

---

[29] Interview dengan bapak Widodo Sekretaris Desa Wonokerto,Tanggal 3 Oktober 2003

[30] Interview dengan bapak Bambang Sukoco, tanggal 29 September 2003

tampak dari kehadiran mereka dalam rapat-rapat yang diadakan pemerintahan desa.[31]

Tidak kurang dari 13 Kepala Dusun, Yang diwakili oleh beberapa oarang utusan, bersama aparatur desa. Utusan dari desa yang selalu hadir dalam pertemuan tersebut adalah, bapak kepala desa beserta sekretaris desa, kemudian kepala urusan pembangunan yaitu bapak Bambang, dan juga beberapa orang utusan dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pertemuan tersebut, peserta adalah wakil dari kelompok kegiatan pembangunan, baik itu dari dusun, kelompok kepemudaan, dan yang lainya.

Kehadiran pemerintahan desa ini juga karena beberapa hari sebelum rapat biasanya mereka mendapatkan surat undangan, sehingga mereka bisa mengatur jadwal dan aktifitasnya. Selain itu, bagi para pegawai pemerintah desa, mereka menyadari bahwa posisi dan kedudukan yang mereka saat ini merupakan amanat dari masyarakat, sehingga mereka harus mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.[32]

Menurut Kepala Desa Wonokerto, menghadirkan masyarakat dalam rapat pembangunan desa adalah untuk mendapatkan masukan dari

---

[31] interview dengan bapak Dwi Rodatin Kepala Urusan Umum, tanggal 3 Oktober 2003

[32] Interview dengan bapak Eko Wahyudi, Sekretaris BPD, Tanggal 2 oktober 2003

tampak dari kehadiran mereka dalam rapat-rapat yang diadakan pemerintahan desa.[31]

Tidak kurang dari 13 Kepala Dusun, Yang diwakili oleh beberapa oarang utusan, bersama aparatur desa. Utusan dari desa yang selalu hadir dalam pertemuan tersebut adalah, bapak kepala desa beserta sekretaris desa, kemudian kepala urusan pembangunan yaitu bapak Bambang, dan juga beberapa orang utusan dari Badan Perwakilan Desa (BPD). Dalam pertemuan tersebut, peserta adalah wakil dari kelompok kegiatan pembangunan, baik itu dari dusun, kelompok kepemudaan, dan yang lainya.

Kehadiran pemerintahan desa ini juga karena beberapa hari sebelum rapat biasanya mereka mendapatkan surat undangan, sehingga mereka bisa mengatur jadwal dan aktifitasnya. Selain itu, bagi para pegawai pemerintah desa, mereka menyadari bahwa posisi dan kedudukan yang mereka saat ini merupakan amanat dari masyarakat, sehingga mereka harus mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat.[32]

Menurut Kepala Desa Wonokerto, menghadirkan masyarakat dalam rapat pembangunan desa adalah untuk mendapatkan masukan dari

---

[31] interview dengan bapak Dwi Rodatin Kepala Urusan Umum, tanggal 3 Oktober 2003

[32] Interview dengan bapak Eko Wahyudi, Sekretaris BPD, Tanggal 2 oktober 2003

masyarakat. Sehingga apa yang akan dilakukan pemerintahan desa, bisa memenuhi harapan mereka[33].

Melibatkan masyarakat dalam rapat-rapat untuk membahas pembangunan desa, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Wonokerto, merupakan sebuah upaya membangun kebersamaan dan penyamaan persepsi serta gagasan terhadap upaya (perencanaan) pembangunan desa yang baik. Karena dalam rapat tersebut akan tampak bagaimana partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun desa. Hal yang sama juga di sampaikan oleh salah satu ketua pemuda, bahwa mereka selalu mengikuti rapat yang diadakan di desa dengan alasan untuk bisa memberikan usulan serta menanggapi apa yang disampaikan didalam rapat desa tersebut.

Hal ini di katakan oleh saudara Ismanto:

> Kami selalu ikut hadir dalam rapat rapat yang dilakukan untuk pembangunan kerena dengan hadirnya kami, maka kami dapat menanggapi serta mengusulkan apa yang bicakan dalam rapat tersebut. [34]

Namun Musyawarah mengenai pembangunan tidak hanya dilakukan pada tingkat desa, karena Pertemuan di desa yang hanya dua kali dalam satu tahun, maka pembangunan yang sifatnya dadakan hanya dilakuakan pada tingkat dusun. Rapat seperti ini merupakan inisiatif warga atau kelompok kegiatan yang akan melaksanakan pembangunan.

---

[33] Interview dengan Bapak Suhartono , Kepala Desa Wonokerto, tanggal 29 September 2003

[34] Interview dengan Saudara iswanto, ketua pemuda, Tanggal 5 Oktober 2003

Dari aparat desa yang diundang untuk hadir dalamrapat tersebut adalah bapak Bambang Sukoco selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa. Perbedaan antara rapat pada tingkat dusun dengan musbangdes, dalam rapat dusun pesertanya adalah seluruh warga padukuhan atau kelompok kegiatan, bukan utusan, kemudian peserta rapat lebih apresiatif.

Kahadiran warga dalam pertemuan adalah wujud riil kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa, warga tidak hanya menyerahkan persoalan ini kepada pemerintahan desa yang telah dipilih. Sehingga yang terjadi kemudian adalah, pemerintahan desa dapat menginventarisir dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat, yang dilakukan pemerintahan desa tidak lebih sebagai representasi dari perangkat-perangkatnya saja.

Kenyataan seperti ini sudah seharusnya terjadi, pemerintahan desa telah melakukan langkah yang tidak merugikan masyarakat dikelurahan Wonokerto, yaitu dengan menjaring peran aktif warga dalam perencanaan pembangunan, demi terpenuhinya kebutuhan warga akan sebuah pembangunan, hal ini adalah sebuah sikap arif sebagai pemimpin desa.terlebih-lebih proses tersebut akan mampuh membangun sebuah komunikasi interaktif antara pemerintahan desa dengan warga desa.

2. Tingkat Usulan/Ide Yang Diajukan Masyarakat Dalam Rapat Desa

Meskipun hanya berupa usulan ide (gagasan), tapi partisipasi langsung dari masyarakat desa akan menunjukkan kepedulian mereka

terhadap kemajuan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus memperhatikan usulan mereka ini. Pemerintahan desa harus bisa mengakomodir gagasan-gagasan masyarakat, paling tidak menjadikannya sebagai bahan untuk diskusi ataupun rapat-rapat desa, bahkan kalau dipandang perlu menjadikannya sebagai acuan dalam upaya pembangunan desa.

Memang, biasanya partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan gagasan ini tidak begitu banyak. Kadang-kadang hanya beberapa orang saja yang tampak menjadi pioner dan yang lain hanya mengikuti. Bahkan tidak sedikit gagasan mereka dimentahkan oleh pemerintah desa, karena dianggap tidak rasional atau tidak mungkin dapat direalisasikan, seperti halnya pembangunan irigasi di dusun sempuh pada tahun 2001 tidak dapat diterima desa, dengan alasan memerlukan dana yang begitu besar serta dan baru di inpentarisir pada program pembangunan tahun 2003.[35]

Namun, kedatangan mereka dalam rapat-rapat desa juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya dalam pembangunan desa, baik perencanaan maupun langkah-langkah teknisnya. Karena dengan masukan-masukan dari masyarakat yang mempunyai pengalaman yang berbeda, tentu semakin bervariasi pula langkah solusi yang bisa dipilih dalam menyeleseikan permasalahan yang terkait dengan upaya pembangunan desa.

---

[35] Iterview dengan bapak Widodo, Sekretaris Desa Wonokerto, Tnaggal 3 Oktober 2003

3. Pemberian Solusi Sumber-Sumber Dana Untuk Pembangunan

Munculnya masalah dalam pembangunan desa sering terjadi, baik yang menyangkut persoalan rencana, biaya maupun tenaga. Untuk itu, pemerintahan desa biasanya mengajak masyarakat untuk berembug bareng mengenai bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Dan tidak sedikit pula masukan dari masyarakat yang bisa dijadikan solusi untuk masalah tersebut.

Realitas ini diakui oleh Bapak Suhartono kepala desa Wonokerto. Karena saat mereka menghadapi permasalahan, banyak masukan positif yang diberikan masyarakat, seperti:

a. Bila menyangkut dana, solusinya bisa melakukan peninjauan kembali terhadap program pembangunan yang akan dijalankan, tentunya dengan lebih menekan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, dapat pula menggali swadaya masyarakat sebesar mungkin untuk menambah anggaran dana. Tentunya tidak dengan waktu yang singkat, namun dengan bertahap.

b. Bila menyangkut kesulitan tentang desain rancang bangun, solusinya bisa dengan mencari warga masyarakat yang ahli di bidang desain rancang bangun, untuk mendesain fasilitas pembangunan yang akan dibangun (misalnya : jembatan, rehab balai desa, jalan, dll). Meski dengan desain yang sederhana, tapi kuat dan tahan lama serta dengan biaya yang relatif terjangkau, tentu lebih baik dari pada harus menyewa desainer dari luar yang tentunya membutuhkan tambahan

biaya lagi. Dan, apabila tidak ada warga yang ahli di bidang ini, pemerintah desa ataupun masyarakat dapat meminta bantuan ke Bappeda setempat, sebagai solusi kedua.

c. Bila kesulitan tentang swadaya tenaga kerja, solusinya adalah aparat desa sebaiknya mendatangi warga untuk mengajak partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya dari segi swadaya dana saja yang diperlukan, namun bantuan tenaga kerja dari warga juga sangatlah penting agar pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.[36]

Beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas merupakan hasil musyawarah bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa, dalam upaya mencari solusi terbaik atas permasalahan yang sedang dihadapi. Khusus untuk permasalahan dana, masyarakat meminta ditarik iuran dari warga, sebagai bentuk partisipasi riil kepedulian mereka terhadap pembangunan desa.

4. Prioritas Pembangunan Yang Akan Dilaksanakan

Selain masukan dalam hal dana maupun tenaga untuk pembangunan, masukan lain dari warga biasanya adalah besama-sama menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk yang satu ini, masyarakat Kelurahan Wonokerto juga ikut aktif berperan aktif.

---

[36] Interview dengan Bapak Widodo, Sekretaris Desa Wonokerto, tanggal 30 September 2003

Hal ini terlihat dari masukan-masukan yang mereka berikan berupa program-program apa saja yang dianggap penting dan menjadi prioritas utama. Karena biasanya desa memiliki banyak program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga untuk menentukan program mana yang seharusnya segera dilaksanakan diperlukan banyak masukan dari masyarakat, sebab yang akan menikmati nantinya adalah masyarakat. Menurut bapak Bambang pembangunan yang menjadi prioritas dilihat dari potensi,bobot,kebutuhan dasar,volume, ,kemudian pembnagunan tersebut tidak bersifat sementara. Tidak sementara maksudnya adalah ide pembangunan tersebut bukan keinginan sesaat, contohnya pengadaaan sarana olah raga.[37]

Kelurahan Wonokerto, dalam menentukan mana program prioritas, biasanya didasarkan segi kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Seperti pada tahun 2002, yang menjadi program prioritas pembangunan desa di Kelurahan Wonokerto adalah perbaikan saluran irigasi, bendung (cek dam) dan perbaikan jembatan, serta prasarana jalan yang menghubungkan dusun satu dengan lainnya. Saluran irigasi, bendung dan jembatan di desa Wonokerto pada tahun 2002 memang perlu direhab, karena saluran irigasi seringkali mampet dan bendungnya juga kurang berfungsi dengan baik, dan jembatan desa pun sudah rusak.

Program ini diprioritaskan oleh desa karena sangat dibutuhkan oleh warga yang sebagian besar mereka hidup sebagai petani dan juga buruh

---

[37] Interview dengan bapak Bambang Sukoco, tanggal 4 Oktober 2004

tani, dimana saluran irigasi dan bendung adalah hal utama untuk mengairi lahan salak yang mereka miliki. Sedangkan untuk prasarana jalan, juga dianggap menjadi prioritas, karena dianggap penting untuk memperlanjar jalur transportasi, khususnya antar dusun yang satu dengan lainnya. Program-program pembangunan yang diprioritaskan oleh desa adalah pembangunan yang sifatnya tidak sementara, prioritas pembangunan juga didasarkan pada kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.[38]

5. Pemilihan Prioritas Daerah Yang Akan Dibangun

Selain untuk mendapatkan pertimbangan dan masukan-masukan mengenai perencanaan, langkah teknis dan solusi atas permasalahan pembangunan desa dan menentukan priorotas program, partisipasi masyarakat desa juga dibutuhkan untuk menentukan wilayah atau daerah yang akan dijadikan sasaran pembangunan. Tentunya, dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Dalam pembangunan ini, salah satu contoh pembangunan tahun 2003, masyarakat Wonokerto meminta untuk daerah yang akan bangun dipilih daerah yang benar-benar membutuhkan, karena itu dipilih daerah atau dusun Ndadapan untuk pembangunan jalan, Sempuh untuk

---

[38]Interview dengan Bapak Hartono, Kepala Desa Wonokerto, tanggal 30 Oktober 2003

pembangunan irigasi dan dusun Gondoarum untuk pembangunan Irigasi. Ketiga daerah ini dianggap layak untuk dijadikan tempat pembangunan desa, karena dianggap memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan dalam rapat desa, yaitu warga daerah/dusun tersebut benar-benar membutuhkan, daerah tersebut belum memiliki sarana dan prasarana fisik desa yang memadai.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Proses perencanaan pembangunan desa Wonokerto melibatkan warga.. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk: kedatangan masyarakat sewaktu diadakan pertemuan untuk merencanakan pembangunan desa, pemberian ide dan usul mengenai pembangunan, memberikan solusi sumber dana yang akan digali, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, perencanaan mengenai waktu pelaksanaan pembangunan dan juga daerah atau wilayah-wilayah yang akan dibangun. Dalam perencanaan pemabangunan yang dilakuakan melalui musyawara pembangunan desa (musbang),meskipun hanya dilaksanakan dua kali dalam setahun, terlihat efektif, karena pemabngunan yang tidak dibicarakan pada pertemuan tersebut dan biasanya bersifat mendadak warga membicarakan dalam rapat dusun.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Tenaga Pembangunan Yang Berupa Gotong Royong Dari Masyarakat

Dalam pembangunan desa, selain diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk gagasan dan ide-ide konstrukstif, diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam bentuk lainnya, seperti sumbangan tenaga dan dana. Untuk kedua hal ini biasanya dalam tradisi-tradisi di pedesaan dikenal istilah gotong royong, yaitu usaha bersama-sama seluruh masyarakat desa untuk membangun desa. Dalam gotong-royong ini nampak sekali partisipasi masyarakat yang sebenarnya, bagaimana mereka mengeluarkan pikiran, tenaga dan juga dana untuk kemajuan desa. Mengeluarkan pikiran untuk mengatur, merencanakan dan membuat strategi serta menerapkan langkah-langkah teknis terbaik yang harus dilaksanakan. Mengeluarkan tenaga sebagai bentuk kongkrit untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Di Kelurahan Wonokerto, gotong-royong bukanlah hal baru, masyarakat bahkan tiap seminggu sekali melakukannya, meski hanya di tingkat gang atau RT (Rukun Tetangga). Pembangunan yang pelaksanaanya di tanggungoleh warga, selalu dalakuakn secara bersama-sama.[39]

---

[39] Interview dengan bapak Muhadi, tanggal 4 Oktober 2003

Langkah ini cukup berhasil dalam mempersatukan masyarakat, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam skala kecil. Karena dengan gotong-royong ini dapat dilihat bagaimana membangun kebersamaan, toleransi dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap tempat tinggal mereka (desa), dengan saling bahu membahu tanpa membedakan status ekonomi, sosial dan politik satu dengan lainnya. Sehingga tak heran untuk pembangunan desa, semua masyarakat Kelurahan Wonokerto dapat ikut serta dan berpartisipasi aktif, sehingga pelaksanaan pembangunan desa pun cepat selesai dan segera dapat dinikmati oleh masyarakat.

Langkah gotong-royong yang ditempuh di Kelurahan Wonokerto ini, menurut saudara Iswanto dianggap sebagai langkah yang terbaik[40]. Gotong royong bagi mereka adalah merupakan sebuah Strategi, sebab dengan gotong royong, maka biayaya pembangunan dapat ditekan dan tidak akan mengalami pembengkakan. Kegiatan gotong-royong biasanya dilaksanakan pada hari-hari yang tidak sibuk (libur), sehingga hampir semua penduduk dapat mengikuti, Sudah menjadi tradisi, masyarakat pun tanpa diminta sudah banyak yang mengikuti, bahkan tidak sedikit yang datang dengan mebawa makanan dan minuman, di samping mereka membawa peralatan. Khusus untuk pembangunan desa pada tahun 2002 yang lalu, masyarakat harus mengeluarkan tenaga dan ekstra, karena hampir seluruh kegiatan perbaikan jalan ditanggung secara swadaya.

---

[40] Intervew dengan saudara Iswanto, ketua pemuda, tanggal 5Oktober 2003.

Beberapa pembangunan di desa Wonokerto pelaksanaanya tidak dilakukan oleh masyarakat, dengan perhitungan luasnya wilayah pembangunan yang akan di bangun, dengan penggunan alat-alat besar, sehingga pembangunan tersebut di serahka kepada kontraktor. Namun sekalipun pelaksanaan pembangunan bukan warga yang melaksanakan, masyarakat desa Wonokerto melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan, sebab mereka khawatir akan kualitas hasil pembangunan. Sistem pengawasan yang mereka lakukan adalah dengan mengontrol para pekerja secara bergiliran, dan orang terebut adalah orang pilihan yang benar-benar mengerti struktur bangunan, karena beberapa warga tidak mengerti tentang bangunan.. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Bambang selaku kepala urusan pembangunan desa Wonokerto, "untuk menjaga kualitas pembangunan maka sistem pengawasan harus diperkuat".[41]

Salah satu contoh pembangunan yang pelaksanaanya tidak dilakukan oleh masyarakat adalah pembangunan irigasi di dusun Sempuh, pembangunan tersebut mendapat bantuan dana dari pemerintah sebesar Rp.127.000.000, termasuk semen dan bahan bahan lain. Dan yang menjadi penganggung jawab dalam pengawasan pembangunan ini adalah bapak Widodo.

---

[41] Interview dengan bapak Bambang, 2 oktober 2003

2. Sumber-Sumber Dana Untuk Pelaksanaan Pembangunan

Untuk pembiayaan pembangunan desa, tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan masyarakat untuk merealisasikan program pembangunan desa. Mengeluarkan dana sebagai konsekwensi atas biaya yang harus ditanggung secara swadaya oleh masyarakat demi terlaksananya pembangunan desa. Pengumpulan dananya biasanya dilakukan dengan model iuran berupa uang, yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menurut bapak Suhartono selaku kepala desa Wonokerto yang tinggal di padukuhan Ndadapan penarikan iuran memiliki ketentuan tersendiri, yaitu setiap pemilik tanah 1000 meter tanah maka biaya yang dikenakan adalah Rp 100.000, dan bagi mereka yang tidak mengikuti kerja bakti (gotong-royong) dikenakan biayaya sebesar Rp. 50.000.[42] Namun lain halnya yang terjadi di dusun Banjarsari, nominal penarikan biayaya iuran untuk pembengunan relatif murah, dengan ketentuan bagi pemilik tanah seluas 1000 meter akan dikenai uang sebesar Rp. 10.000[43], serta keringanan, berupa sumbangan seikhlasnya bagi warga yang kurang mampuh. Pengumpulannya biasanya dilakukan mereka yang telah ditunjuk oleh warga, juga penarikan dana tersebut dapat dilakukan oleh aprat pemerintahan desa yang menarik dari rumah ke rumah, setelah jauh hari sebelumnya diinformasikan kepada semua penduduk. Penarikan uang tersebut adalah penarikan diluar uang

---

[42] Interview dengan bapak Suhartono, Kepal Desa Wonokerto, Tanggal 4 Oktober 2003.

[43] Interview dengan Bapak Heru Kepala Dusun Banjarsari. Tanggal 4 Oktober 2003

pajak, penarikan itu hanya dilakukan oleh warga jika ada pembangunan yang akan dibangun. Dari data yang peneliti peroleh jumlah uang dari warga nominalnya jauh lebih besar bilah di banding dengan uang yang diberikan oleh kelurahan Wonokerto, sebagai contoh pembangunan talut jalan di dusun Arjosari yang membutuhkan dana sebanyak Rp.56.702.260, dana swadaya dari masyarakat sebesar 18.775.200. sedangkan bantuan dana dari pemerintahan desa hanya 250.000. Menurut bapak Sutomo selaku ketua pembangunan, kekurangan dana tersebut mereka tanggulangui dengan mengajukan proposal ke Pemda Sleman.[44]

Model iuran yang diterapkan di Kelurahan Wonokerto ini terbilang cukup bersahabat dan menarik. Bersahabat karena memang dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya masyarakat ditarik tiap bulan dengan jumlah uang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang, dan tidak ada paksaan sama sekali. Sehingga masyarakat merasa tidak keberatan untuk menyisihkan dan memberikan sebagian rezeki mereka untuk pembangunan. Dikatakan menarik karena proses penarikan dan pengelolaannya dilakukan sedemikian rupa oleh petugas yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh masyarakat untuk menarik iuran.[45]

---

[44] Interview dengan bapak Sutomo, tanggal 5 Oktober 2003

[45] Interview dengan Bapak Widodo, Sekretaris Desa Wonokerto, 30 September 2003

Setiap pembangunan desa yang memerlukan dana besar, kelurahan selalu memberikan kucuran dana stimulan, dengan dana perkegiatan sebesar Rp.250.000, kecuali untuk sarana ibadah dan pendidikan kucuran dana yang diberikan lebih besar jumlahnya, berkisar Rp1.000.000-1.500.000.[46] Pembangunan yanhg tidak mendapatkan dana stimulan adalah pembagunan yang dananya dapat di tanggulangi oleh masyarakat, serta pembangunan yang tidak direncanakan pada saat musyawara pembangunan desa.

3. Alat-Alat Yang Digunakan dalam Pembangunan Desa

Karena pembangunan desa ini sifatnya swadaya, maka selain dari iuran yang ditarik dari masyarakat, ada juga warga yang membantu atau menyumbang dengan suka-rela. Biasanya sumbangan mereka selain berupa uang juga berupa bahan-bahan materiil untuk pembangunan. Mereka yang menyumbang bahan-bahan material ini biasanya dari golongan ekonomi yang cukup mampu menurut ukuran Kelurahan Wonokerto.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa masyarakat Wonokerto tidak melibatkan alat-alat berat seperti dari Departemen Prasarana Umum (DPU), tapi cukup masyarakat sendiri yang mengerjakannya, tentunya dengan semua peralatan yang terbilang sederhana, seperti dengan cangkul, sabit, ember, gergaji, pukul besi, pengaduk semen (cethok),

---

[46] Interview dengan bapak Widodo, Sekretaris Desa tanggal 4 oktober 2003

keranjang untuk mengangkut pasir, keranjang untuk mengangkut batu, meteran dan lain-lainnya.[47]

Dengan kondisi seperti ini, maka pelaksanaan pembangunan terkadang harus dilakukan dengan waktu lama, sehingga pembangunan desa harus dilakukan secara bertahap. Salah satu contoh adalah pembangunan masjid di dusun Gondoarum. Hal ini merupakan konsekwensi yang harus diterima masyarakat Wonokerto, karena memang selain mengalami keterbatasan dana, tenaga yang bergotong-royong pun sangat terbatas.

4. Bahan-Bahan Material Yang Digunakan Dalam Pembangunan Desa

Seperti disebutkan di atas, bahwa selain menarik iuran warga, untuk pembangunan desa ini juga mencari donatur dari luar serta menerima sumbangan dari warga maupun masyarakat luar desa. Karena itu tidak heran jika banyak sumbangan yang diberikan oleh warga selain yang berupa uang. Sumbangan-sumbangan tersebut biasanya berupa bahan material yang berupa; Semen, kayu, pasir, batu bata, paku, batu kali dan peralatan untuk pembangunan desa lainnya.

Menurut bapak wakijan yang ikut menyumbang bahan material, dengan sumbangan yang diberikan beliau berharap pembangunan akan

---

[47] Intervie dengan bapak Muhadi, tanggal 6 Oktober 2003

berjalan dengan lancar dan cepat selesai serta dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Dan Ini merupakan bentuk partisipasi mereka dalam ikut memajukan pembangunan desa. [48]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan desa Wonokerto, keberhasilannya sangat tergantung dari pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa ini melibatkan semua unsur dan elemen yang ada dalam masyarakat seperti: unsur tenaga kerja, dalam hal ini adanya gotong royong masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, adanya sumber-sumber dana yang akan diambil untuk membiayai pembangunan desa, alat-alat yang digunakan untuk pembangunan, bahan-bahan/material yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan lain-lain.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Pembangunan Desa

1. Menjaga Hasil Pembangunan

Dalam menjaga hasil pembngunan tidak banyak yang dapat dilakuakan oleh warga desa Wonokerto, dari hasil wawancara dengan waraga desa biasanya mereka hanya melakukan perbaikan dan menjaganya denagan membersikan seperti: saluran air, talut jalan sarana ibadah seperti masjid dan lain sebagainya[49] .

---

[48] Interview dengan Bapak Wakidjan, Tokoh Masyarakat, 1 Oktober 2003

[49] Wawancaara dengan Bapak Heru, warga desa, Tanggal 3 oktober 2003

Kegitan untuk membersikan talut biasanya mereka lakukan se-bulan sekali dengan bergotong royong bersama-sama warga yang lainya. Denga selalu memperbaiki sarana-saran yang telah rusak , menunjukan bahwah warga desa Wonokerto benar-benar menjaga hasil pembangunan semaksimal mungkin. Menjaga hasil pembangunan tersebut dikarenakan rasa kepemilikan mereka terhadap pasilitas yang telah ada, dan juga mereka merasa bahwa bangunan tersebut yang membuat adalah mereka sendiri, dengan mengorbankan tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Dan sarana yang ada dapat digunakan tergantung dari sejaumana mereka dapat merawatnya. Sebaliknya menjaga hasil pembangunan hampir tidak pernah terjadi pada pembangunan yang mengedapankan strategi top-down. Suntikan dana pemerintah mengubah sikap mental masyarakat, yaitu sikap ketergantungan sehingga penilaian yang terjadi dalam masyarakat terhadap pembangunan adalah semua program pembangunan dan pemeliharaan pemabangunan merupakan tanggung jawab pemerintah bukan tanggung jawab asyarakat desa.[50]

2. Memanfaatkaan hasil pembangunan

Salah satu unsur pengadaan pembangunan baik itu pembangunan yang bersifat pisik maupun non pisik adalah sisi manfaatnya. Dan yang mengetahui bermanfaat atau tidak pembangunan adalah masyarakat yang berdomisili di tempat tersebut, bukan pemerintah yang berada di luar daerah desa yang akan di bangun.

---

[50] Syafri Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, hlm. 244

Dari sekian pembangunan yang telah di bangun di desa Wonokerto dapat dikatakan semuanya bermanfaat dan warga tidak menyia-nyiakan hasil dari pembanguna tersebut. Kepuasan terlihat dalam diri mereka dari hasil pembangunan. Karena mayoritas masyarakat desa Wonokerto adalah petani salak pondo yang banyak memerlukan air, maka dengan baiknya saluran irigasi air akan menjadi lancar guna mengairi lahan pertanian salak yang mereka miliki.

Pemanfaatan hasil pembangunan desa tersebut dapat dilihat secara nyata pada:

a. Semakin lancarnya saluran irigasi
b. Semua areal lahan pertanian dapat teraliri air dengan cukup
c. Adanya penampungan air guna kepentingan irigasi
d. Semakin suburnya lahan pertanian
e. Hasil panen cukup berlimpah
f. Pendapatan sebagian warga masyarakat khususnya petani semakin meningkat.
g. Semakin lancarnya arus transportasi sehingga masyarakat lebih efisien waktu dalam berinteraksi dengan dunia luar
h. Jalan-jalan dusun tidak lagi becek jika hujan dan juga tidak lagi berdebu jika musim kemarau.[51]

D. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa

1. Perbandingan Antara Rencana Dengan Hasil Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebenarnya tidak hanya diperlukan pada tahap awal maupun tahap pelaksanaan, tapi setelah pelaksanaan proyek pembangunan desa pun, peran mereka masih diperlukan, yaitu melakukan evaluasi atas proyek tersebut. Begitu pun yang terjadi di Kelurahan Wonokerto, hampir semua pemerintahan desa dan masyarakat terlibat aktif, mulai dari Kepala, desa, Sekretariat Desa, LKMD, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat hingga warga masyarakat.

Dalam rapat desa ini seluruh proses pelaksanaan pembangunan desa dipertanggungjawabkan ke seluruh komponen masyarakat oleh perangkat desa. Mulai dari penggalangan dana, pembelian bahan material, pelaksanaan pembangunan desa dan juga kelebihan atau kekurangan dananya. Setelah itu baru diadakan evaluasi dari kinerja warga dalam melaksanakan pembangunan desa. Apabila ada kekurangan dapat segera disempurnakan.

Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa ini dapat dirasakan. Juga seberapa besar tingkat partisipasi dari warga masyarakat selaku pelaksana kegiatan pembangunan ini.

Dari evaluasi pembangunan desa ini, sebagaimana diungkapkan

---

[51] Interview Dengan Bapak Widodo, Sekretaris Desa Wonokero, 4 Oktober 2003

kepala desa Wonokerto, ada beberapa hal yang muncul, diantaranya:

a. Kesadaran warga masyarakat akan pentingnya pembangunan desa untuk kebutuhan warga sendiri sehingga mereka melaksanakan pembangunan dengan sungguh-sungguh.

b. Karena dana, tenaga dan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan desa ini berasal dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat, maka mereka mengelola dana, dan juga membantu tenaga kerja dengan baik sehingga dana dipergunakan dengan sebaik-baiknya didukung oleh bantuan tenaga kerja (gotong-royong) dari masyarakat.

c. Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa ini selalu dipersiapkan dengan matang segala sesuatunya. Seperti adanya panitia dan pengawas pembangunan, yang bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dijauhkan adanya penyimpangan-penyimpangan.

d. Dalam proses pembangunan ini dilakukan secara transparan baik dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Sehingga semuanya serba terbuka dan diketahui oleh masyarakat[52].

2. Ada Tidaknya Penyimpangan Dalam Proses Pembangunan

Sebagaimana hasil evaluasi di atas, dalam pelaksanaan pembangunan desa ini, tidak ditemukan penyimpangan. Baik penyimpangan dana maupun penyimpangan rencana ataupun program pembangunan. Hanya saja, ada beberapa perubahan yang terjadi dari

---

[52] Interview Dengan Bapak Hartono, Kepala Desa Wonokerto, 3Oktober 2003

pembangunan. Hanya saja, ada beberapa perubahan yang terjadi dari rencana program semula. Karena pada awalnya program yang akan dilaksanakan hanya satu, mengingat keterbatasan dana yang ada, namun setelah warga berinisiatif untuk iuran, akhirnya pembangunan bisa dilaksanakan dengan 3 program sekaligus, yaitu pembangunan irigasi, bendung dan jalan desa.

Selain karena partisipasi dan kepedulian warga desa, tidak adanya penyimpangan ini juga karena adanya kesadaran warga secara bersama-sama untuk ikut serta mengawasi dan memonitoring jalannya atau proses pembangunan desa, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun setelah selesainya pembangunan, dengan evaluasi secara keseluruhan terhadap hasil pembangunan.

Berdasarkan realitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa setelah tahap perencanaan pembangunan dan juga pelaksanaan pembangunan dapat dijalankan, maka tahap selanjutnya yang sebaiknya dilakukan oleh seluruh masyarakat adalah mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan. Dalam evaluasi ini dilakukan pembandingan antara segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam pembangunan dengan segala sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga nantinya diketahui adanya kekurangan ataupun kelebihan dari pelaksanaan pembangunan, ada penyimpangan pembangunan atau tidak dan apakah pembangunan telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

seluruh warga masyarakat. Dan tahapan ini nampaknya juga dilakukan dalam pembangunan desa di desa Wonokerto.

Uraian di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Wonokerto dalam pembangunan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa tersebut. Partisipasi tersebut bisa berupa partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dapat diukur dari kehadiran mereka dalam rapat desa, usulan yang diberikan dalam rapat desa, masukan solusi untuk masalah yang dihadapi desa dan menentukan prioritas program dan wilayah yang akan dijadikan objek pembangunan tersebut. Sedangkan untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dapat dilihat dari peran mereka dalam ikut serta mengupayakan dan mengeluarkan tenaga serta biaya untuk pembangunan, juga menyediakan alat-alat dan bahan untuk pembangunan desa. Dan untuk tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa, dapat diukur dari keterlibatan mereka dalam memberikan kritik dan saran (evaluasi) atas kinerja dan hasil pembangunan desa, termasuk dalam hal ini adalah melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan desa.

Dari keempat hal diatas; perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan dan evaluasi pembangunan, yang merupakan kunci pokok keberhasilan pembangunan di desa Wonokerto, nampaknya telah dilakukan oleh

aparat desa Wonokerto beserta seluruh warganya. Ini bisa dilihat dari perencanaan pembangunan yang matang, juga pelaksanaan pembangunan yang terpadu dari masyarakat serta adanya evaluasi pembangunan yang transparan.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa tingkat pastisipasi masyarakat desa Wonokerto dalam pembangunan desa, nampaknya tidak hanya termotivasi karena perasaan takut atau sekedar ikut-ikutan solidaritas, tapi lebih dari itu adalah karena dasar bahwa berpartisipasi tersebut merupakan hak dan sekaligus kewajiban mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan merupakan sebuah kesadaran dan bukan karena paksaan. Ini didasari oleh pertimbangan, bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan peluang peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan disamping juga nantinya mereka berhak untuk ikut menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Juga, karena mereka (setiap warga) merasa berkewajiban untuk ikut serta memikul beban tanggungjawab dan mensukseskan jalannya pembangunan.

Selain faktor di atas, faktor lainnya yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa Wonokerto adalah karena program pembangunan desa, khususnya pembangunan desa diarahkan bagi kesejahteraan semua warga, yang tidak membeda-bedakan kondisi dan status. Juga, karena mereka mempunyai struktur kepemimpinan yang cocok, artinya para pemimpin desa mempunyai kepentingan yang sama

dengan masyarakat. Hal inilah yang mendukung semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang sedang berjalan sangat tergantung dengan intensitas beberapa lapisan masyarakat yang ada, misalnya saja tentang pendidikannya serta bervariasinya motivasi yang mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut. Tapi, dari semua hal ini, yang jelas, pasrtisipasi masyarakat di Wonokerto menunjukan tingkat yang cukup tinggi, karena mereka terlibat aktif dalam pembangunan desa, yang memerlukan sumbangan mental, pikiran dan perasaan serta energi atau fisik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena dengan ikut andilnya warga dalam pembangunan akan dapat menimbulkan rasa kepemilikan sekaligus sikap untuk memeliharahasil dari pembangunan tersebut. Partisipasi warga desa Wonoerto dalam penelitian ini akan dilihat dari empat tahap:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dari pemaparan pada bab tiga, keikutsertaan warga dalam perencanaan terlihat cukup baik, dari ikut hadir dalam rapat warga yang membahas mengenai pembangunan, kehadiran warga dalam rapat sangat membantu guna kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan, masukan warga dapat dilihat dari usulan atau ide mengenai pembangunan, memberikan solusi sumber dana. Pemberian Solusi pendanaan dapat mengurangi biaya pembangunan, seperti yang terdapat dalam bab III, mengenai desain atau rancang bangunan, jika yang mendisain orang luar akan membutuhkan biaya yang besar, maka mereka mencari warga yang dapat merancangnya. Kemudian warga juga memberikan masukan dalam mencari prioritas pembangunan serta daerah yang akan dibangun.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa tingkat partisipasi masyarakat kelurahan Wonokerto juga sangat baik, terbukti dengan model gotong-royong yang

diterapkan, pembiayaan secara swadaya dan banyaknya bantuan masyarakat baik berupa tenaga, finansial maupun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Semua ini dilakukan dengan kesadaran tinggi sebagai warga dan juga keinginan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar dan dapat diseleseikan dengan segera, Melaksanakan pembangunan dengan bergotong-royong bagi mereka adalah merupupakan strategi untuk meringankan dana pembangunan

3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan. Rasa kepemilikan terhadap pembangunan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan hasil pembangunan. Dan rasa kepemilikan tersebut timbul dari anggapan bahwa pembangunan tersebut adalah hasil dari usaha serta jerih payah warga, manfaat yang mereka daptkan. Oleh karena itu warga selalu menjaga, serta memfungsikan sebaik mungkin. Manfaat pembangunan diantaranya dapat dilihat dari semangkin mudahnya warga dalam mengairi lahan pertanian salak, jalan yang tidak lagi becek.
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan. Keterlibatan warga dalam evaluasi dapat diukur dari bagaiman mereka memberikan kritik dan saran terhadap kinerja dan hasil pembangunan. hasil pembangunan. Namun warga tidak pernah merasa tidak puas dengan bersikap tidak rasional. Kesadaran sebagai warga dan langkah riil dalam membantu pembangunan desa ini merupakan bukti nyata partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Model partisipasi seperti inilah yang ada di Kelurahan Wonokerto. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi

masyarakat dalam pembangunan desa di kelurahan ini cukup baik

B. SARAN-SARAN

1. Untuk Aparat Pemerintahan Desa:

   a. Sebaiknya sebisa mungkin meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena jika aparat pemerintahan tidak ikut aktif menggalang partisipasi mereka, masyarakat akan enggan untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan. Peningkatan kamandirian warga dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada warga, mengurangi campur tangan desa sehingga desa benar-benar menjadi fasilitator.

   b. Aparat pemerintahan desa hendaknya juga memperhatikan pembangunan lainnya dan tidak hanya pembangunan pisik desa saja, seperti pembangunan mental spiritual masyarakatnya, pembanguan sosial budaya dan lain sebagainya. Sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Pembangunan di desa Wonokerto, secara pisik terlihat cukup maju, hal tersebut dapat dibuktikan dengan semangkin meningkatnya sarana-perhubungan, sarana irigasi, sarana ibadah dll, namun pembangunan dari aspek mental tampaknya sangat tidak seimbang bila dibanding dengan pembangunan yang bersipat pisik. Hal tersebut disebabkan penyimpangan konsep pembangunan, sehingga setiap kata pembangunan hanya akan bersentuhan dengan hal-hal yang bersipat infra-struktur (sarana-sarana pisik). Konsekuensi dari kesalahan tersebut adalah ketertinggalan warga desa Wonokerto dalam kehidupan sosial keagamaan, sikap kritis yang tidak dibarengi

dengan ilmu pengetahuan sering menjadi alasan konplik. Kekeliruan tersebut dapat diperbaiki melalui pembinaan secara terus menerus, maka Kepekaan dari para aparatur desa sangatlah diperlukan. Jika pemahaman tersebut tidak dibenarkan maka kemajuan masyarakat desa wonokerto dalam aspek sosial budaya akan lebih lambat jika dibanding dengan pembanguan yang bersifat pisik.

c. Bagi aparat pemerintahan desa yang menjadi panitia atau pelaksana pembangunan desa, sebaiknya hasil evaluasi pembangunan diberikan secara transparan kepada masyarakat, misalnya dengan menempelkan di mading informasi desa atau diumumkan kepada seluruh masyarakat melalui pertemuan tertentu. Hal ini untuk menghindari prasangka buruk terhadap aparat pemerintahan desa maupun ketidakjelasan mengenai pembangunan desa.

2. Untuk Warga Masyarakat

a. Sebaiknya selalu menanamkan sikap mandiri, serta maningkatkan peranserta dalam pembangunan desanya. Karena partisipasi sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan tersebut, baik pembangunan pisik desa maupun pembangunan di bidang sosial, ekonomi maupun seni dan budaya..

b. Dalam pembangunan desa, selayaknya warga desa mermperhatikan pembangunan di bidang sosial budaya hingga terjadi keseimbangan demi terwujudnya pembangunan seutuhnya, yaitu pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, aspek pisik maupun mental

spritual. Dengan pembangunan seperti tersebut maka pembangunan akan lebih utuh dalam membangun harkat dan martabat manusia.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat allah swt yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat selesai.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal musngkin dengan mencurahkan segenap kemampuan yang penulis miliki agar hasil skripsi ini dapat memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan dalam pembuatan skripsi, sekaligus bermanfaat bagi yang membacanya.

Sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan skripsi ini sangat penulis sadari, hingga masih banyak kasalahan didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca, demi untuk sempurnanya hasil dari skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta*, PT Raja Grafido Persada, 1988

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Devis, Keit, dalam Santoro Sastropetro, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1998

Julianto, Dadang, *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa,* Yogyakarta, Lapera Utama, 2002

Mikkelsen, Brittha *Metode penelitian, partipatoris dan Upaya-upaya pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, .

Moezakik, M. Djauzi, *Teori dan Praktek pengembangan masyarakat (Suatu pedoman Bagi pra praktisi*), Surabaya, Usaha Nasional, 1986

Moeljarto, *Politik Pembangunan,* Yogyakarta, Tiara Wacana, 1987

Mubyarto, *Strategi Pembangunan Desa Terpadu*, Yogyakarta, PPSK UGM, 1982

P Siagian, Sondang, *Filsafat Administrasi,* Jakarta, Gunung Agung, 1979

ssSabirin, Safri, *Perubahan sosial Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Sutrisno, Loekman, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan,* Yogyakarta, Kanisius, 2001

Sumodiningrat, Gunawan, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif* , Jakarta, Impac Wahana Cipta,1999

Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 1990

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3S, 1998

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Tjokroamodjojo, Bintarto, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, PT Gunung Agung, 1985

Talizidhuhu Ndraha *Metodologi penelitian Pembangunan Desa,* Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Todaro, dalam Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan,* Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 1999

Usman, Sunyoto, Pembangunan *Dan Pemberdayaan Masyarakat,* Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1998